

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul

DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MEDIA ONLINE DETIK.COM,
KOMPAS.COM, DAN VIVANEWS

Analisis Isi Perbandingan Komentar Pembaca Media Online Detik.com,
Kompas.com, dan VIVAnews dalam Pemberitaan Polemik Qanun Bendera dan
Lambang Aceh 25 Maret – 17 April 2013

B. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia dalam kalangan terbatas mulai mengenal internet pada tahun 1990-an. Penggunaan internet kala itu masih terbatas dan belum sekompleks sekarang. Keterbatasan ini disebabkan oleh minimnya fasilitas pendukung untuk dapat menyambungkan komputer di Indonesia dengan penyedia layanan internet di luar negeri.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat akan informasi, jaringan internet juga semakin diperluas dengan munculnya perusahaan penyedia jasa layanan internet di Indonesia. Jaringan internet dalam perkembangannya menjadi semakin luas dan semakin mudah diakses oleh masyarakat umum. Dengan layanan internet tersebut, informasi yang beredar di masyarakat menjadi lebih besar dalam jumlah maupun dalam jangkauan.

Setelah kurang lebih tiga belas tahun mulai digunakan di Indonesia, internet berkembang dengan pesat dan digunakan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat Indonesia. Menurut data terakhir yang diperoleh dari Asosiasi

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet pada tahun 2012 sejumlah 63 juta orang atau sekitar 24,23 persen dari populasi warga di Indonesia. (Oik Yusuf, kompas.com 13 Desember 2012)

Peningkatan jumlah pengguna internet meungkinkan semakin banyak informasi diterima oleh masyarakat. Media sebagai institusi bisnis yang menggunakan informasi sebagai komoditas kemudian turut menggunakan layanan internet sebagai tempat penyaluran informasi kepada publik. Interaksi antara publik dengan media kemudian terjadi juga melalui internet, yang disebut dengan media online.

Pada awalnya media online di Indonesia merupakan versi online dari media cetak. Media cetak yang sudah ada dibuatkan halaman web dengan nama yang sama, kemudian pekerja media memindahkan konten (tulisan dan gambar) yang dimuat di edisi cetak ke dalam versi online. Namun pada tahun 1998 muncul media online detik.com yang memiliki redaksional sendiri, bukan sekadar memindahkan dari versi cetak.

Dengan kemudahan-kemudahan yang didapatkan melalui media online, kini hampir semua media memiliki halaman web secara online. Halaman web ini digunakan untuk berbagai macam keperluan, mulai dari redaksional hingga bisnis media melalui pemuatan iklan.

Karakteristik media online yang paling menonjol adalah kecepatan penyampaian informasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Dalam hitungan menit hampir dipastikan sudah ada berita terbaru yang ditampilkan dalam media online. Bahkan David Shenk dalam artikel berjudul *The First Law of Data Smog*

(Bucy, 2002: 216) menuliskan “*We began to produce information much faster than we could process it.*” Dengan kata lain informasi yang beredar di dunia maya ini lebih cepat diproduksi dibandingkan dengan kecepatan khalayak memproses informasi tersebut.

Kecepatan yang menjadi kekuatan media online juga terletak pada kecepatan pembaca untuk dapat berinteraksi dengan media. Pemberian komentar ini menjadi sangat cepat dibandingkan dengan ketika menulis surat pembaca pada media cetak yang paling cepat dimuat satu hari setelah surat itu dikirim. Cara yang digunakan adalah dengan menuliskan komentar pada kolom yang disediakan di bawah berita media online. Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan, komentar itu bisa berupa sikap terhadap isu, solusi, ataupun sekadar komentar ringan yang bersifat sindiran, lelucon, atau bahkan hinaan.

Zvi Reich dalam artikel berjudul *User Comments: The transformation of participatory space* (2011:96) menuliskan bahwa perlu ada perhatian yang khusus kepada komentar-komentar yang dituliskan oleh pembaca. Menurut dia memang komentar-komentar tersebut dituliskan oleh segelintir pengunjung suatu website media, dan hanya segelintir pengunjung pula yang akhirnya membaca deretan komentar tersebut. Meski hanya sedikit, mereka adalah pembaca yang mengikuti proses akhir dari jurnalisme, yaitu interpretasi pembaca. Dia juga menuliskan lima alasan mendasar mengapa perlu memberikan perhatian pada komentar pembaca yang hendak dipaparkan dalam bab berikutnya.

Kebebasan dalam berkomentar ini lalu diletakkan dalam kerangka besar sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi memang tidak serta merta

diterjemahkan sebagai kebebasan berbicara atau manifestasinya yaitu memberikan komentar, namun lebih dimaknai sebagai bagaimana warga negara menggunakan haknya sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, setiap warga secara politis memiliki hak yang sama dengan warga lainnya.

Namun kebebasan berbicara sebagai semangat demokrasi ternyata tak lagi cukup untuk membangun sebuah sistem dan budaya demokrasi yang sehat. Untuk tujuan itu dimunculkanlah sebuah konsep deliberasi, yang berasal dari bahasa latin *deliberatio* yang berarti konsultasi atau menimbang-nimbang, atau dalam istilah politik adalah musyawarah. (Hardiman, 2009:128)

Proses deliberasi yang mensyaratkan adanya diskusi publik seperti ini membutuhkan ruang, sebagaimana dituliskan Amy Gutmann dan Dennis Thompson :

Deliberative democracy makes room for many other forms of decision-making (including bargaining among groups, and secret operations ordered by executives), as long as the use of these forms themselves is justified at some point in a deliberative process. Its first and most important characteristic, then, is its reason-giving requirement. (Gutmann dan Thompson, 2004:3)

Ruang tersebut disediakan dengan dasar argumentasi bahwa warga tidak hanya dipandang sebagai objek legislasi yang pasif, melainkan sebagai sebuah entitas mandiri yang ikut berpartisipasi dalam pemerintahan mereka sendiri. Salah satu bentuk partisipasi warga yang paling sederhana adalah mengungkapkan pendapat melalui media-media. Maka komitmen perusahaan-perusahaan media untuk memberi ruang partisipasi warga di dalam media

tersebut merupakan langkah yang tepat untuk mewujudkan konsep diskusi publik dalam kehidupan bermedia.

Berangkat dari konsep internet dan demokrasi deliberasi tersebut, peneliti melihat perlunya kajian secara ilmiah atas proses demokrasi yang dapat dilihat di media online. Secara spesifik, bagian yang dilihat adalah bagian komentar atas berita tertentu yang diangkat oleh media online. Dalam proses penelitian ditemukan tiga media online yang hendak dipelajari, yaitu Detik.com, Kompas.com, dan VIVAnews.

Pemilihan ketiga media online ini didasarkan oleh tingginya tingkat pengunjung media ini menurut data yang didapatkan dari halaman website alexa.com (diakses pada tanggal 12 Juni 2013 pukul 10:51). Ketiganya menduduki urutan teratas sebagai media online di Indonesia yang paling banyak dikunjungi oleh pengguna internet.

Berdasarkan data yang didapat dari situs tersebut di Indonesia detik.com menduduki peringkat delapan, kompas.com menduduki peringkat 12, dan viva.co.id menduduki peringkat 17. Peringkat tersebut berkaitan dengan seberapa banyak pengunjung yang membuka ketiga situs berita online itu dengan segala motivasi dan tujuan yang melekat.

Peneliti mengangkat kasus polemik Bendera Aceh yang diberitakan dalam rentang waktu 25 Maret hingga 17 April 2013. Dalam pandangan peneliti kasus ini merupakan rangkaian dari konflik bertahun-tahun yang terjadi di Aceh. Konflik ini tidak lepas dari keinginan sekelompok masyarakat Aceh yang

tergabung dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM), untuk melepaskan Aceh dari Indonesia.

Dilihat dari keamanan suatu negara, tindakan ini dianggap sebagai tindakan makar yang membahayakan kesatuan negara. Reaksi pemerintah Indonesia atas tindakan makar tersebut adalah dengan menjadikan Propinsi Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) yang sudah dicabut pada 7 Agustus 1998. Sekitar tujuh tahun kemudian, tepatnya 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dengan GAM menandatangani perjanjian damai dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki di Finlandia.

Isi perjanjian tersebut kemudian diturunkan ke dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 246 yang tercantum dalam UU tersebut merupakan penyebab polemik kasus ini. Isi dari pasal tersebut adalah:

1. Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan.
3. Bendera daerah Aceh sebagai lambing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan symbol kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambing sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum inilah yang membuat pemerintah Aceh membentuk Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh. Permasalahannya adalah bendera dan lambang Aceh tersebut mempunyai desain yang sama dengan bendera dan lambang GAM. Dari sinilah muncul kekhawatiran dari berbagai pihak mengenai tindakan separatis yang berpotensi tidak hanya dilakukan oleh propinsi Aceh namun juga propinsi yang lain apabila pemerintah Republik Indonesia tidak melakukan tindakan.

Peneliti melakukan pengamatan secara singkat pada tanggal 8 April 2013 mengenai isi dari komentar-komentar yang dituliskan oleh pembaca di media-media online. Dari pengamatan singkat itu ditemukan bahwa ada berbagai sikap pembaca terhadap peresmian bendera Aceh. Interaksi pembaca ini merupakan hal yang menarik untuk diamati, terutama ketika dilihat dari kerangka kehidupan demokrasi di Indonesia yang juga dipengaruhi oleh kehadiran media.

Penelitian mengenai demokrasi deliberatif dalam isi komentar pembaca media online ini dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Maria Christine Anggraeni Sadipun dari Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta pernah melakukan penelitian serupa mengenai deliberasi publik. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 ini membandingkan komentar pembaca di situs berita *kompas.com* dan *social media* Kompasiana mengenai kasus Ahmadiyah.

Temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa kedua saluran media, www.kompas.com dan www.kompasiana.com, masih memiliki potensi yang minim untuk dapat membentuk deliberasi publik yang ideal. Peneliti menuliskan (2011:158) “..pengamatan terhadap komentar-komentar pembaca yang ada pada kedua media belum dapat merepresentasikan diskusi yang pantas untuk menemukan jalan keluar permasalahan ini.” Kontribusi yang diberikan warga melalui kedua saluran media ini untuk memberikan solusi bagi permasalahan Ahmadiyah juga belum diberikan dengan optimal.

Sedangkan di Kanada ditemukan penelitian tentang demokrasi deliberatif yang dikaitkan dengan motivasi elite dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan oleh Genevieve Fuji Johnson dengan laporan penelitian berjudul “The Limits of Deliberative Democracy and Empowerment: Elite Motivation in Three Canadian Cases”. Penelitian ini dilakukan pada tiga lembaga: Canadian Nuclear Waste Management Organization (NWMO), Nova Scotia Power Incorporated (NSP), dan Toronto Community Housing Corporation (TCHC).

Ketiga lembaga ini dipilih dalam penelitian sebab para elite dalam lembaga tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi deliberasi dengan cara melakukan konsultasi publik. Johnson (2011:139) mengungkapkan lima faktor yang dapat membantu orang memahami mengapa para elite ini menggunakan kekuatan anggota untuk mengambil keputusan-keputusan publik. Kelima faktor itu adalah prinsip normatif (*normative principle*), tekanan publik (*public pressure*), syarat kebijakan (*policy requirement*), kepentingan manajemen

strategis (*strategic management interest*), dan kepentingan ekonomi (*economic interest*).

C. Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan isi komentar pembaca pada Detik.com, Kompas.com, dan VIVAnews dilihat dari sudut pandang demokrasi deliberatif?

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana perbandingan isi komentar pembaca pada Detik.com, Kompas.com, dan VIVAnews dilihat dari sudut pandang demokrasi deliberatif.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat akademis

Menambah kajian mengenai demokrasi terutama ditilik dari perspektif komunikasi politik.

b. Manfaat praktis

Mengevaluasi masyarakat, terutama pengguna internet, mengenai budaya demokrasi yang sedang dibangun melalui tindakan berkomunikasi di media online.

F. Kerangka Teori

Pada bagian ini peneliti hendak menjelaskan mengenai teori demokrasi deliberatif. Peneliti menjelaskan terlebih dahulu beberapa pemikiran dari masing-masing kata, lalu pada bagian berikutnya baru menjelaskan mengenai demokrasi deliberatif sebagai teori yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Demokrasi

Ditilik dari asal katanya, istilah demokrasi berarti rakyat berkuasa atau *government by the people*. Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan atau berkuasa. (Budiarto, 2008:105) Pada zaman Yunani Kuno, sistem demokrasi yang berlaku adalah demokrasi langsung. Saat itu sistem demikian bisa dilakukan karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana. Sedangkan pada era modern ini sistem demokrasi yang digunakan adalah perwakilan, atau *representative democracy*.

Kedua sistem demokrasi yang disebutkan tadi berbeda, namun memiliki dasar pemikiran yang sama bahwa sistem demokrasi tidak bisa tidak melibatkan warga. Warga sendiri adalah dasar dan tujuan demokrasi diciptakan sebagai sistem yang dipilih untuk dijalani oleh suatu negara. Berdasarkan tulisan Gastil (2008:5-7) ada tiga kriteria yang spesifik dari proses demokrasi yang diungkapkan oleh ilmuwan politik Robert Dahl. Kriteria-kriteria yang disebutkan adalah kriteria yang berlaku dan bekerja pada kelompok-kelompok sosial yang memiliki pandangan demokrasi. Tiga kriteria yang dimaksud adalah *inclusion*, *participation opportunities*, dan *enlightened understanding*.

Penekanan pada kriteria *inclusion* adalah bahwa orang dewasa yang berada pada suatu kelompok harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika suatu kelompok membatasi semua orang dewasa untuk terlibat, maka sistem yang dianut kelompok tersebut tidak dapat dikatakan demokratis. Orang dewasa dalam kriteria ini dimaknai sebagai warga yang memiliki pemahaman dan sikap atas suatu isu tertentu. Sedangkan kelompok selain orang dewasa adalah anak-anak

yang dianggap belum memiliki kapasitas untuk membentuk pemerintahan sendiri dan orang di luar kelompok yang tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut.

Pada kriteria *participation opportunities*, penekanan terletak pada bagaimana anggota dari sistem demokrasi menggunakan peluang yang dimiliki untuk berpartisipasi. Setiap orang yang berada dalam sistem demokrasi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi melalui tiga cara yang berkaitan: meletakkan isu pada agenda publik, mengekspresikan pandangan atas isu tersebut, dan melakukan voting atas isu tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kriteria yang ketiga, *enlightened understanding*, merupakan kriteria secara kognitif. Setiap anggota dari sistem demokrasi memiliki kesempatan untuk memikirkan isu-isu mana yang hendak mereka letakkan pada agenda, apa yang mereka pikirkan mengenai isu tersebut, dan bagaimana mereka harus melakukan voting ketika diberikan kesempatan untuk itu. Pemberian hak bagi setiap orang untuk melakukan voting saja ternyata tidak cukup. Untuk melakukan itu setiap orang mesti mendapat kesempatan untuk merefleksikan nilai yang mereka anut dan mendapatkan informasi yang cukup.

2. Deliberasi

Pada bagian awal sudah dituliskan bahwa kata deliberasi berasal dari kata *deliberatio* yang berarti konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Gastil (2008:9) menuliskan beberapa deskripsi mengenai kata deliberasi.

- i. Deliberasi bermula ketika publik membentuk sebuah informasi dasar yang mendalam dan akurat sehingga memastikan semua warga memahami persoalan dengan terang.
- ii. Publik melakukan identifikasi dan menentukan prioritas mengenai nilai-nilai apa saja yang berkaitan dengan suatu isu yang dibicarakan.
- iii. Publik melakukan identifikasi solusi dalam skala yang luas yang mungkin mampu menyelesaikan permasalahan.
- iv. Publik melakukan proses menimbang-nimbang antara dukungan pro dan kontra dengan cara menerapkan ilmu pengetahuan dengan sistematis untuk mencapai beberapa alternatif solusi atas permasalahan.

Keempat poin tersebut menunjukkan bahwa proses deliberasi merupakan proses pengambilan keputusan publik atas suatu isu berdasarkan tingkat pemahaman yang mendalam dan proses diskusi yang panjang. Dengan demikian deliberasi bukan saja diletakkan dalam kerangka ilmu politik mengenai pengambilan keputusan, melainkan juga berkaitan dengan proses komunikasi sosial.

Komunikasi sosial ini dilakukan oleh publik, itulah sebab dalam perkembangannya kata deliberasi juga dikaitkan dengan kata publik. Cook, Carpini, dan Jacobs (2007:28) menuliskan tiga prinsip mengenai deliberasi publik yang diuraikan pada paragraf berikut.

Pertama, deliberasi publik adalah sebuah alat untuk mendidik dan melatih warga. Fungsi pendidikan dalam hal ini adalah dengan cara membentuk warga menjadi warga yang memiliki informasi dengan baik, tercerahkan, dan memiliki

sikap yang tidak mudah dimanipulasi. Selain itu sistem deliberasi melatih warga untuk membangkitkan rasa percaya kepada institusi politik dan sesama warga sendiri.

Kedua, partisipasi dalam deliberasi publik dipandang sebagai alat untuk membangun moral warga. Moral warga ini dibangun dan diuji terutama ketika mereka sedang melakukan diskusi mengenai suatu isu bersama. Di dalam diskusi tersebut akan terdapat pertarungan kepentingan dan nilai yang harus mereka putuskan bersama. Dengan cara ini warga dilatih untuk menerima bahwa harus ada keputusan yang tidak hanya baik bagi segelintir orang, namun demi kebaikan bersama.

Ketiga, deliberasi publik dipandang sebagai sebuah mekanisme yang unik untuk menghasilkan sebuah keputusan bersama. Deliberasi publik digunakan sebagai metode untuk berdiskusi dan bernegosiasi atas isu-isu untuk menghasilkan putusan. Cara ini dianggap mampu memecahkan tradisi yang lalu, sehingga dianggap berbeda.

3. Demokrasi Deliberatif

Gutmann dan Thompson (2004:3-6) menuliskan empat macam karakteristik dari demokrasi deliberatif. Karakteristik pertama merujuk pada tersedianya ruang bagi publik dalam berbagai bentuk untuk turut ambil bagian dalam pengambilan keputusan. Karakteristik kedua berkaitan dengan aksesibilitas semua warga untuk berproses dalam memberikan pertimbangan yang sehat. Karakteristik ketiga dikatakan bahwa proses ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah keputusan yang mengikat pada periode waktu tertentu. Karakteristik keempat berkaitan dengan

prosesnya yang dinamis, begitu juga dengan keputusannya yang bergantung pada dialog yang dilakukan.

Dari keempat karakteristik tersebut dapat dikatakan bahwa demokrasi deliberasi adalah bentuk dari pemerintahan yang memiliki warga yang bebas dan setara, dalam konteks ini adalah menyampaikan pendapat. Di dalam pemerintahan tersebut ditemukan diskusi di mana keputusan diambil berdasarkan dialog yang dilakukan publik.

Untuk mencapai sebuah proses deliberasi yang ideal, Habermas (1996) sebagaimana dikutip dalam Coleman & Blumler (2009:18) menyampaikan empat kondisi yang sesuai. Menurut dia empat kondisi ini begitu esensial bagi sebuah proses deliberasi, begitu pula dengan hasil dari deliberasi itu sendiri. Keempat kondisi tersebut adalah:

- i. Setiap orang harus mampu menyampaikan ide mereka sendiri secara terbuka dan sekaligus mampu memberikan kritik atas ide yang lain.
- ii. Konsep mengenai kuasa, yang diasosiasikan dengan status sosial, harus dihapus.
- iii. Argumentasi yang berdasarkan suatu tradisi atau dogma harus dimunculkan.
- iv. Sebuah kebenaran harus dimunculkan dari konsensus.

John Gastil (2008:18-19) menuliskan dengan singkat model diskusi publik yang ideal menurut Jurgen Habermas dan kehidupan demokrasi yang kuat menurut Benjamin Barber. Jurgen Habermas mengkonseptualisasikan situasi ideal tersebut dengan dua orang atau lebih yang mempertanyakan pandangan seseorang mengenai dunia (isu) hingga masing-masing perspektif menemukan satu dasar yang sama untuk mencapai keputusan.

Sedangkan Benjamin Barber, sebagaimana dikutip Gastil (2009:19), menekankan tulisannya mengenai demokrasi pada dua aktivitas yang berbeda, yaitu *talk* dan *conversation*. *Talk* menurut Barber diartikan sebagai proses pengimajinasian, mendengarkan, dan memahami dengan kompleks. Sedangkan *conversation* lebih kepada proses yang terbuka mengenai pengkonstruksian yang sama mengenai pemecahan masalah.

Demokrasi deliberatif dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari konsep *conversation* yang baru saja dijelaskan. Maka Gastil menuliskan dua proses, proses analisis dan proses sosial, sebagai pedoman bagaimana pengertian demokrasi deliberatif diletakkan dalam kerangka konsep *conversation*.

Tabel 1. Key Features of Deliberative Conversation and Discussion

<i>General Definition of Deliberation</i>	<i>Specific Meaning for Conversation/Discussion</i>
<i>Analytic Process</i>	
<i>Create a solid information base</i>	<i>Discuss personal and emotional experiences, as well as known facts.</i>
<i>Prioritize the key values at stake.</i>	<i>Reflect on your own values, as well as those of others present.</i>
<i>Identify a broad range of solutions.</i>	<i>Brainstorm a wide variety of ways to address the problem.</i>
<i>Weigh the pros, cons, and trade-offs among solutions.</i>	<i>Recognize the limitations of your own preferred solution and the advantages of others.</i>
<i>Make the best decision possible.</i>	<i>Update your own opinion in light of what you have learned. No joint decision need be reached.</i>
<i>Social Process</i>	
<i>Adequately distribute speaking</i>	<i>Take turns in conversation or take</i>

<i>opportunities.</i>	<i>other action to ensure a balanced discussion.</i>
<i>Ensure mutual comprehension.</i>	<i>Speak plainly to each other and ask for clarification when confused.</i>
<i>Consider other ideas and experiences.</i>	<i>Listen carefully to what others say, especially when you disagree.</i>
<i>Respect other participants.</i>	<i>Presume that other participants are honest and well intentioned. Acknowledge their unique life experiences and perspectives.</i>

Sumber: Gastil, 2008:20

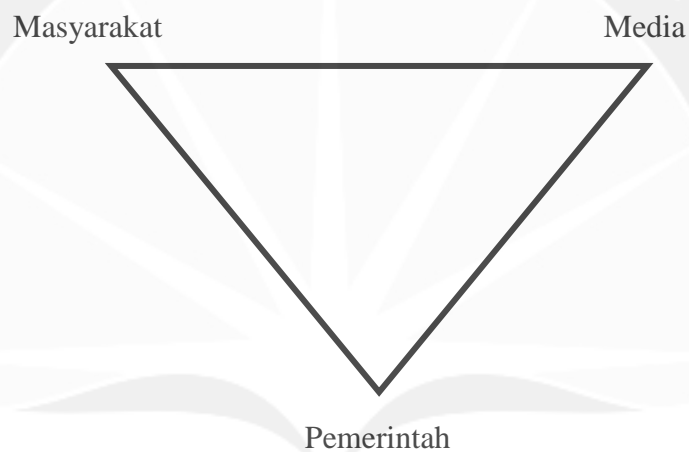
4. Komunikasi Politik: Masyarakat, Media, dan Pemerintah

Penelitian yang dilakukan berkaitan erat dengan tema komunikasi politik. Kaitan tersebut tampak dari argumentasi bahwa sebuah komentar yang dianalisis merupakan sebuah pesan komunikasi yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah melalui media online. Cangara (2011:30) merumuskan komunikasi politik sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta memengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.

Sedangkan menurut Soesanto (1986) sebagaimana dikutip dalam Ardial (2010:28) mengartikan komunikasi politik sebagai komunikasi yang diarahkan pada pencapaian pengaruh sedemikian rupa sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat semua warganya melalui sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Kegiatan komunikasi

politik dipandang sebagai jalan penghubung antara masyarakat sosial dengan negara.

Menilik dari kedua pengertian di atas, peneliti menemukan bahwa ada tiga aktor penting dalam sebuah proses komunikasi politik. Ketiga aktor penting tersebut adalah masyarakat, media, dan pemerintah. Cagara mencantumkan sebuah skema mengenai hubungan antara media dengan pemerintah (politisi) serta masyarakat:



Gambar 1. Pola Hubungan Kerja Sama antara

Masyarakat, Media, dan Pemerintah (Sumber: Cagara, 2011:109)

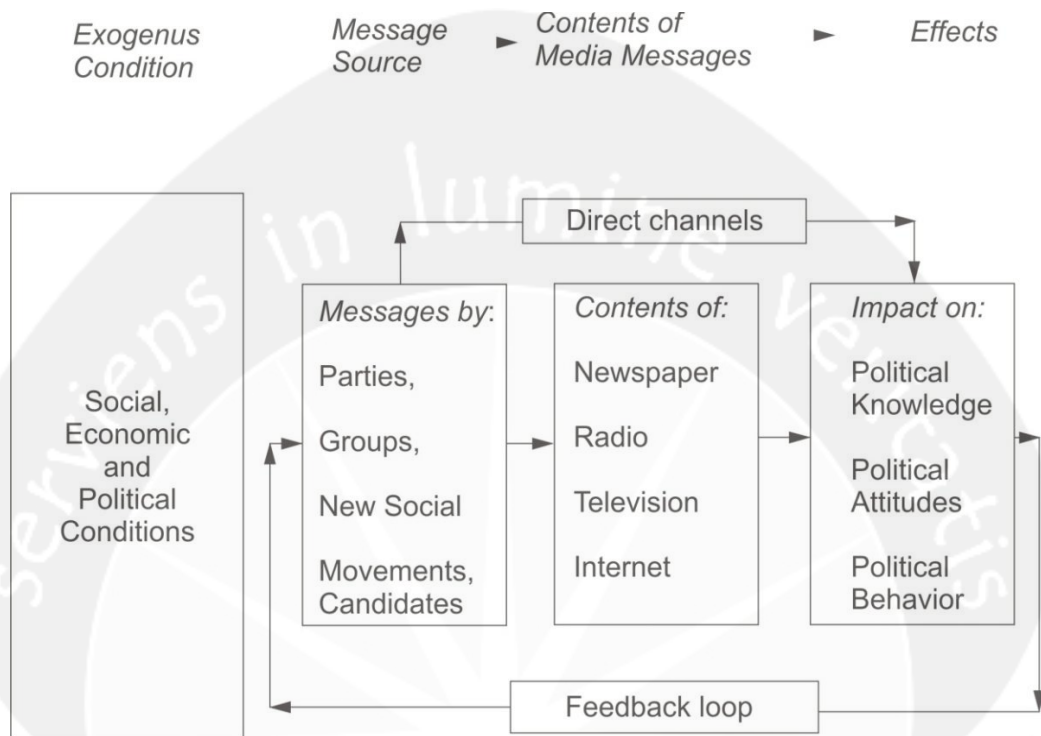
Dari pola tersebut tampak jelas bahwa proses komunikasi politik tidak hanya terjadi antara pemerintah dengan masyarakat. Media juga menjadi aktor yang berperan dalam proses komunikasi tersebut. Tidak hanya itu, media juga dipandang bukan sekadar saluran atau tempat menyediakan arena pertarungan

wacana publik di antara kedua aktor yang lain. Media mampu menyampaikan pesan baik kepada masyarakat ataupun pemerintah secara langsung.

Peran media ini diperkuat dengan argumentasi dari Rivers (1980) sebagaimana dikutip oleh Ardial (2010:29) yang dengan tegas menunjuk hubungan media massa dengan pemerintah sebagai bagian penting dari studi komunikasi politik. Rivers menyebutkan empat bidang penelitian komunikasi politik yang penting. Pertama, pengaruh pemerintah terhadap media. Yakni studi tentang peraturan, hukum, pengendalian ekonomi, aturan-aturan pengumpulan berita, dan penyensoran. Kedua, sistem informasi pemerintahan yang meliputi saluran informasi formal maupun informal mengenai personel pemerintahan. Ketiga, adalah dampak media terhadap pemerintah seperti penggunaan media oleh para pejabat, dan dampak pemberitaan terhadap perilaku pejabat. Keempat, terpusat pada media, kelembagaan, isi berita dan aspek-aspek lain yang dipelajari melalui analisis isi.

Dalam kaitannya dengan studi komunikasi politik, Pippa Norris (2004:17) menuliskan tiga kategori yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi politik. Tiga kategori yang dimaksud adalah produksi, konten, dan efek.

Relasi antara ketiga hal tersebut tampak dalam model komunikasi politik sebagai berikut:



Gambar 2. Model Sistem Komunikasi Politik

Sumber: Pippa Norris (2004:17)

Proses produksi pesan dalam sistem komunikasi politik terjadi di awal. Pesan yang diproduksi ini tidak dapat lepas dari konteks dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik dari masyarakat dan pemerintahan tempat pesan itu diproduksi. Berdasarkan gambar di atas, pesan dapat diproduksi oleh partai politik, kelompok, gerakan sosial, dan kandidat tokoh politik.

Penelitian pada kategori produksi pesan memiliki penekanan pada bagaimana pesan dimunculkan oleh aktor-aktor politik yang kemudian dikirimkan melalui *direct channel* maupun *indirect channels*. Berdasarkan gambar di atas,

direct channel berarti aktor politik mengirim pesan secara langsung kepada masyarakat yang dapat dilakukan melalui kampanye politik. Sedangkan melalui *indirect channels* aktor politik mengirim pesan melalui surat kabar, radio, televisi, dan internet.

Tradisi penelitian komunikasi politik yang juga umum dilakukan adalah meneliti konten dari pesan yang diproduksi aktor politik. Penelitian mengenai konten pesan ini dilakukan dengan mengamati berita politik yang ada di televisi, mengkaji konsep keseimbangan dalam pelaporan berita, kampanye politik, dan representasi dari masyarakat minoritas di dalam berita media.

Penelitian pada kategori pesan politik ini pada umumnya dilakukan pada berita dan media yang spesifik. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, meskipun pendekatan kualitatif untuk meneliti pesan kini juga sudah banyak dilakukan. Tujuan dari penelitian pesan komunikasi politik adalah untuk menemukan relasi antara isi pesan dengan salah satu proses produksi atau dengan akibat-akibat pemberitaan yang berpotensi terjadi.

Sedangkan pada kategori efek pesan komunikasi politik penelitian dilakukan pada khalayak atau masyarakat yang menerima pesan tersebut. Metode penelitian yang pada umumnya dilakukan adalah survei, atau dengan metode eksperimental. Isu-isu yang masuk ke dalam kategori efek adalah perbedaan efek pada jenis media yang berbeda, yang didadalmnya juga btergantung dari pengetahuan dan opini politik yang berbeda, sikap, dan perilaku politik.

G. Unit Analisis

Unit analisis merupakan bagian tersendiri yang diberi kode dan kemudian dihitung. Pada proses ini unit analisis menyediakan cara yang standar untuk menjabarkan teks menjadi elemen-elemen yang hendak dianalisis. Berger (1998), sebagaimana dikutip oleh Keyton (2006:236), menyebutkan pentingnya membuat unit analisis. Tanpa unit analisis yang standar atau seragam, analisis data akan tidak valid dan teks-teks yang dianalisis kemudian tidak bisa diperbandingkan.

Berdasarkan teori Demokrasi Deliberatif yang digunakan, peneliti menyusun unit analisis. Unit analisis ini disusun berdasarkan model demokrasi deliberatif yang diletakkan dalam konsep *conversation*.

Dimensi	Unit Analisis	Kategorisasi	Sub Kategorisasi
Proses Analisis	Narasi	Ada atau tidak penyebutan pengalaman pribadi secara eksplisit tentang isu yang dibicarakan	Ada (1)
			Tidak ada (0)
	Fakta	Kelengkapan penyebutan informasi aktual berupa data-data, undang-undang, dan detail peristiwa terkait isu yang dibicarakan	Sangat lengkap (3)
			Lengkap (2)
			Tidak lengkap (1)
			Tidak ada (0)
	Sumber	Penyebutan narasumber, link berita, judul buku atau artikel dari media cetak, siaran televisi atau radio	Lebih dari satu sumber (2)
			Satu sumber (1)
			Tidak ada sumber (0)
	Nilai-nilai	Ada atau tidak penyebutan nilai	Ada (1)
			Tidak ada (0)
	Alasan	Penyebutan alasan melawan	Lebih dari satu alasan (2)

			Satu alasan (1)
			Tidak ada alasan (0)
	Solusi	Ada atau tidak ada penyebutan secara eksplisit solusi untuk isu yang sedang dibicarakan	Ada (1)
			Tidak ada (0)
Proses Sosial	Responsivitas	Tanggapan terhadap komentator lain	Tidak responsif (0)
			Respon rendah (1)
			Respon cukup (2)
			Respon tinggi (3)

Sumber: kerangka teori

H. Definisi Operasional

Pada bagian definisi operasional peneliti hendak menjelaskan masing-masing bagian dari unit analisis dan kategori yang telah dibuat. Singarimbun dan Effendi (ed) (1989:46) menuliskan: “Definisi operasional adalah suatu informasi ilmiah yang amat membantu peneliti lain yang ingin menggunakan variabel yang sama.” Maka selain digunakan sebagai pedoman peneliti untuk tahap analisis, definisi operasional ini dibuat sebagai referensi penelitian-penelitian dengan tema yang serupa.

Berikut penjelasan mengenai masing-masing bagian dari unit analisis dan kategori yang digunakan dalam penelitian:

a. Proses analitis

Pada proses analitis hal yang ditekankan adalah pada bagaimana pembaca memandang, memahami, dan bersikap atas suatu isu yang menjadi polemik di dalam pemberitaan. Proses ini tampak dan mampu dianalisis salah satunya

ketika pembaca turut menuliskan komentar. Untuk melihat proses ini peneliti menjabarkan proses analitis ke dalam enam unit analisis:

1. Narasi

Penekanan pada unit analisis ini adalah pada penyebutan pengalaman pribadi yang dialami oleh pembaca, terkait dengan isu yang diberitakan. Kategorisasi dari unit analisis ini adalah penyebutan pengalaman pribadi secara eksplisit tentang isu yang diberitakan. Komentar yang menyebutkan adanya pengalaman pribadi terkait dengan isu yang diberitakan menandakan adanya perbincangan yang semakin deliberatif. Sebaliknya, komentar yang tidak menyebutkan adanya pengalaman pribadi menandakan perbincangan yang cenderung tidak deliberatif.

2. Fakta

Penekanan pada unit analisis ini adalah pada penulisan informasi-informasi faktual terkait dengan isu yang diberitakan. Informasi-informasi ini bisa berupa undang-undang yang mengatur dan data yang relevan dengan isu. Kategorisasi dari unit analisis ini adalah kelengkapan penyebutan informasi dan data yang aktual. Supaya lebih spesifik, dibuatlah sub kategorisasi sangat lengkap (ditemukan lebih dari dua informasi faktual), lengkap (ditemukan dua informasi faktual), tidak lengkap (ditemukan satu informasi faktual), dan tidak ada (tidak ditemukan informasi aktual). Semakin sebuah komentar itu mengandung informasi aktual yang lengkap, maka pembicaraan semakin mengarah kepada deliberasi. Sebaliknya, semakin tidak mengandung informasi

aktual yang lengkap, atau tidak ada sama sekali, maka semakin jauh dari konsep deliberasi.

3. Sumber informasi

Penekanan pada unit analisis ini adalah adanya penyebutan sumber informasi. Kategorisasi dari unit analisis ini adalah tautan (*link*) ke portal berita online, penyebutan dari media yang lain, kutipan ucapan dari seorang *public figure*, dan tentang latar belakang atau sejarah dari isu yang diberitakan. Sub kategorisasi yang dibuat adalah lebih dari satu sumber, satu sumber, dan tidak ada sumber. Semakin banyak sumber yang ditemukan dalam komentar, maka perbincangan akan semakin bersifat deliberasi. Sebaliknya, bila tidak ada sumber informasi yang ditemukan menandakan bahwa perbincangan semakin tidak deliberatif.

4. Nilai-nilai

Penekanan pada unit analisis ini adalah pada penyebutan nilai-nilai yang terkait dengan isu. Kategorisasi yang ditentukan adalah ada atau tidak ada penyebutan nilai-nilai terkait dengan isu yang diberitakan. Beberapa nilai yang memiliki keterkaitan dengan isu Qanun dan Lambang Bendera Aceh di antaranya nasionalisme, nilai agama atau religiusitas, kerukunan, kesatuan, dan perdamaian.

5. Alasan

Penekanan dari unit analisis ini adalah pada penyebutan alasan dari sikap pembaca yang menyetujui, menolak, ataupun tidak keduanya. Kategorisasi dari unit analisis ini adalah jumlah alasan atau argumentasi yang dituliskan oleh

pembaca atas sikap yang dipilih. Sub kategorisasi dari unit analisis ini adalah lebih dari satu alasan, satu alasan, dan tidak ada alasan.

6. Solusi

Penekanan dari unit analisis ini adalah penyebutan solusi yang diusulkan atas isu yang diberitakan. Kategorisasi dari unit analisis ini adalah ada atau tidak ada penyebutan secara eksplisit solusi untuk isu yang sedang dibicarakan. Penyebutan solusi menandakan adanya kehendak dari pembaca untuk menyelesaikan suatu permasalahan, dan itu menandakan perbincangan yang semakin deliberatif.

b. Proses sosial

Ketika proses analitis menekankan pada bagaimana pembaca memahami suatu isu dan kemudian menuliskannya dalam komentar, dimensi proses sosial lebih menekankan kepada bagaimana pembaca bersikap terhadap komentar yang muncul dari pembaca yang lain, atau secara umum terhadap pandangan yang bukan berasal dari mereka sendiri. Untuk melihat indikasi proses sosial ini peneliti menggunakan satu unit analisis sebagai berikut:

1. Tingkat responsivitas

Penekanan dari unit analisis ini adalah dalam suatu komentar ditemukan tanggapan terhadap komentar dari pembaca yang lain. Tanggapan yang dimaksud bisa berupa persetujuan atau sanggahan, membangun argumentasi, dan melontarkan pertanyaan. Sub kategorisasi yang digunakan dalam kategori ini adalah respon tinggi (di dalam komentar ditemukan sanggahan atau setuju, argumentasi, dan pertanyaan), respon cukup (di dalam komentar ditemukan

kombinasi dari dua jenis tanggapan), respon rendah (di dalam komentar ditemukan satu jenis tanggapan saja), dan tidak responsif (di dalam komentar tidak ditemukan tanggapan terhadap komentar lain).

I. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang hendak dilakukan merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif. Azwar (2007:5) menuliskan bahwa penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Sedangkan deskriptif menunjukkan pada bagaimana peneliti menganalisis data numerikal yang muncul.

Pada penelitian ini angka-angka diperoleh dari pembobotan sampel yang dituliskan dalam unit analisis. Tiap sampel dari setiap media diberi bobot tertentu dalam bentuk angka, kemudian dihitung menggunakan metode statistika sederhana. Setelah itu hasil penghitungan masing-masing media dibandingkan untuk melihat bagaimanakah komentar-komentar pembaca di media online jika dilihat dari sudut pandang demokrasi deliberatif.

b. Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif untuk menganalisis data yang sudah ditemukan. Metode analisis isi adalah salah satu metode sistematis untuk menganalisis isi dari suatu produk komunikasi. (Hansen, 1998:91) Artinya bahwa analisis isi kuantitatif bukan satu-satunya metode untuk menganalisis isi media.

Kerlinger (2000) (dikutip dari Wimmer dan Dominick (2011:156)), menuliskan bahwa analisis isi adalah sebuah metode mempelajari dan menganalisis komunikasi dengan cara yang sistemik, objektif, dan kuantitatif untuk mengukur variabel. Sedangkan Keyton (2006:235) menuliskan bahwa dalam konteks penelitian ilmu komunikasi, analisis isi merupakan salah satu tipe teknik reduksi data. Cara ini digunakan oleh peneliti dengan menggunakan angka dan statistika untuk merepresentasikan aksi dan persepsi dari partisipan mengenai komunikasi.

Metode analisis isi memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menghitung karakteristik tertentu dari sebuah teks. Hasil dari dua cara kerja itu lalu digunakan sebagai dasar untuk mengatakan sesuatu tentang pesan, gambar, representasi dari teks, dan kepentingan sosial yang lebih luas dari mereka.

c. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik riset dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang dianalisis dalam penelitian. Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis (Bungin, 2005:154). Pada penelitian ini data historis diinterpretasi sebagai komentar-komentar pembaca selama periode waktu yang ditentukan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Dalam Bungin (2005:132) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer diperoleh dari sumber data primer, yaitu sumber pertama di mana sebuah data

dihasilkan. Data yang berupa komentar pembaca ini merupakan data utama yang dibutuhkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder yang didapatkan dari sumber sekunder digunakan untuk melengkapi teori yang digunakan untuk menganalisis data primer.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan komentar pembaca pada tiga media online yang menduduki peringkat pengunjung paling atas di Indonesia. Komentar pembaca yang dikumpulkan merupakan komentar atau tanggapan terhadap berita-berita mengenai Qanun Bendera dan Lambang yang menjadi polemik pada sekitar bulan Maret hingga April 2013.

d. Teknik sampling

Sebelum menuliskan teknik sampling yang digunakan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan mengenai populasi data. Menurut Bungin (2005:109) populasi penelitian merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Dalam penelitian ini populasi yang ditentukan adalah semua komentar pembaca yang dimuat dalam ketiga media online yang sudah disebutkan. Berikut populasi penelitian yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 2. Populasi data dari www.kompas.com

Bulan	Tanggal	Judul	Komentar
Maret	22	Demo Tolak Qanun Bendera Berakhir Ricuh	15
	23	Aceh Resmi Adopsi Bendera GAM	160
	24	Bendera Aceh adalah Simbol Persatuan	91
	25	Bendera GAM Resmi Berlaku di Aceh	51
	26	Bendera Bulan Bintang ala GAM "Haram"	11

		Berkibar di Gayo	
	26	Bendera GAM Diarak Keliling Kota	37
	27	Menko Polhukam Kaji Qanun Aceh	14
	27	Bendera Bulan Bintang, Bukan Bendera Separatis	20
	28	Pemerintah Evaluasi Qanun, Siapkan Catatan Koreksi	70
	28	JK: Bendera Aceh Jangan Sampai Membuka Luka Lama	87
	30	JK dan Yusril Ikut Pertemuan Bahas Bendera Aceh	40
	30	Pro-Kontra Qanun Bendera dan Lambang Aceh	90
April	1	Pendukung Bendera Aceh Gelar Bendera Raksasa di Masjid Raya	42
	1	Merah Putih di Takengon, Bulan Bintang di Banda Aceh	41
	1	Ribuan Orang Arak Bendera Aceh	94
	1	Pemerintah Minta Bendera dan Lambang Aceh Diubah	30
	1	Seribu Lembar Merah Putih Dikibarkan di Aceh Barat	9
	1	Aceh Diminta Pakai Lambang Kejayaan Masa Lalu	15
	1	Pemda Diminta Tarik Qanun Bendera dan Lambang Aceh	21
	2	Selesaikan Soal Bendera Aceh secara Bijaksana	33
	2	Ribuan Merah Putih Berkibar di Meulaboh	3
	2	Bendera Bintang Bulan Harus Bersanding dengan Merah Putih	7
	2	PDI-P: Bendera Aceh Ganggu Keutuhan NKRI	34
	2	Soal Bendera, Pemerintah Aceh Diberi Waktu 15 Hari	6
	2	Gubernur Aceh: Perdamaian Aceh Lebih Penting	44
	2	Kemendagri Serahkan Berkas Klarifikasi Soal Bendera Aceh	3
	2	Yusril: Bendera Aceh Tak Sesuai Kesepakatan Pertemuan Konsultasi	61
	3	JK: Perjanjian Helsinki Melarang Penggunaan Simbol GAM	109
	3	Buyung: Qanun Tidak Boleh Menyalahi Aturan	41
	3	Mendagri: Bendera dan Lambang Aceh Jangan	53

		Ditarik ke Politik	
	3	Kontroversi Bendera Aceh, Polri Upayakan Situasi Tetap Kondusif	35
	5	Presiden: Aceh Jangan Kembali ke Masa Konflik	39
	5	Priyo: Aceh Istimewa, tapi Tetap Harus Tunduk Aturan	9
	5	Priyo: Saya Sedih Ada yang Minta Aceh Dimekarkan	13
	5	Bahas Bendera Aceh, Presiden Undang Gubernur Aceh	27
	6	Perjanjian Helsinki, Aceh Merdeka secara De Facto	394
	10	Aceh Segera Jawab Klarifikasi Mendagri soal Bendera	9
	10	Presiden Bisa Batalkan Qanun Lambang-Bendera Aceh	22
	15	Soal Bendera Aceh, Pemerintah 'Cooling Down'	18
	15	Gubernur Aceh: soal Bendera, Ini Masalah Kecil	57
1965	17	Gubernur Aceh Klarifikasi Qanun ke Presiden	9
Mei	1	Rabu, Gamawan Bertemu Gubernur Aceh	1

Sumber: diolah dari indeks berita www.kompas.com

Jumlah berita yang didapatkan dari www.kompas.com sejumlah 42 buah berita, dengan jumlah komentar sebanyak 1965 buah. Berita-berita tersebut diambil melalui layanan indeks pencarian topik berita, lalu peneliti memilih judul dan isi berita yang relevan dengan penelitian.

Tabel 3. Populasi data dari www.detik.com

Bulan	Tanggal	Judul	Komentar
Maret	27	Pemprov Aceh Sahkan Bendera GAM Menjadi Bendera Aceh	138
	27	Kemendagri Akan Evaluasi <i>Qanun</i> Soal Bendera GAM Jadi Bendera Aceh	61
	27	Pengibaran Bendera GAM Marak Usai Penetapan Qanun Bendera & Lambang Aceh	52

	27	DPRA: Qanun Bendera dan Lambang Aceh Kerangka Pelaksanaan MoU Helsinki	59
	29	Ini Cerita JK Saat Bertemu Gubernur Aceh Sebelum Bendera GAM Disahkan	58
	30	Bila Sebatas Identitas Bendera, Lambang GAM di Aceh Sah Saja	26
April	1	Seribuan Orang Berkonvoi Kibarkan Bendera GAM di Banda Aceh	23
	1	Mendagri Ditugaskan Tuntaskan Kontroversi Bendera GAM	15
	1	Dibanding Urus Bendera, Pemprov Aceh Fokus Saja Sejahterakan Warganya	7
	1	Bendera GAM Dikibarkan di Banda Aceh, Warga Aceh Tengah Arak Merah Putih	42
	2	Pengibaran Bendera GAM Dikhawatirkan Berpotensi Sulut Perpecahan	26
	2	Kontroversi Bendera Aceh, Komisi II DPR: Pemerintah Berhak Evaluasi Qanun	30
	2	Tolak Lambang GAM, Warga Aceh Barat Bagikan 1.000 Bendera Merah Putih	21
	2	Soal Lambang GAM, PDIP: Tak Ada Bendera Selain Merah Putih	18
	2	Kemendagri Beri Pemprov Aceh 15 Hari untuk Revisi Qanun Soal Bendera	9
	3	Qanun Dievaluasi, Gubernur Minta Bendera Aceh Jangan Berkibar Dulu	65
	3	Pemerintah Tawarkan Aceh Pakai Bendera Lambang Sultan Iskandar Muda	24
	3	Komisi II Minta Mendagri Batalkan Qanun Bendera Aceh	14
	3	Mendagri Ajak 3 Dirjen Bahas Bendera Aceh	12
	3	Waka DPR: Selesaikan Kasus Bendera Aceh dengan Kepala Dingin	0
	4	Menhan Berharap Gubernur Aceh Bersedia Revisi Qanun Soal Bendera	4
	4	Menhan Berharap Pemprov Aceh Tak Pakai Lambang GAM	10
	4	Yogya Tak akan Tiru Aceh, Bendera Tetap Merah Putih	52
	4	Keterlalu! Mendagri Disambut Ribuan Orang Berbendera GAM di Banda Aceh	174
	4	Mendagri Disambut Bendera GAM di Banda Aceh, Merah Putih Diarak di Aceh Tengah	29
	4	Mendagri Disambut Bendera GAM, Menhan:	16

		Tak Ada Indikasi Separatisme	
	4	Massa Konvoi Merah-Putih Bakar Bendera GAM	70
	5	Soal Qanun Bendera, Gubernur Aceh: Kita Mencari Solusi, Bukan Adu Tinju	14
	5	Perjuangkan Bendera GAM, Wagub Aceh Muzakir Manaf Akan Temui Presiden	69
	5	Presiden SBY Harap Masalah Bendera GAM Tuntas Pekan Ini	5
	5	Kasus Bendera GAM di Aceh, SBY: Merah Putih Harus Tetap Berkibar	23
	5	Soal Qanun Bendera, Polri Minta Warga Aceh Tak Terprovokasi	1
	5	Boleh Berkibar 15 Hari Saja	4
	5	DPR Usul Presiden & Mendagri Turun Tangan Selesaikan Soal Bendera Aceh	0
	6	Pengibaran Bendera GAM Jangan Disikapi dengan Emosional	65
	6	Kemendagri Peringatkan Jangan Ada Lagi Pengibaran Bendera GAM di Aceh	13
	6	DPR Aceh Mulai Bahas Hasil Klarifikasi Mendagri Terhadap Qanun Bendera	4
	6	Soal Qanun Bendera, DPR Aceh Sambut Positif Keseriusan SBY	12
	7	Bendera Aceh Rentan Menyulut Problem Baru, Solusinya Harus Komunikatif	36
	8	Megawati: Bendera Kita Merah Putih, Titik!	72
	8	DPD Soal Polemik Qanun Aceh: Bendera Merah Putih Harga Mati!	6
	8	Panglima TNI: Untuk Sementara Lambang Bendera GAM Jangan Dikibarkan	19
	8	Mendagri Minta Pemprov & DPRD Aceh Evaluasi Qanun Lambang dan Bendera	6
	9	Lagi, Seribuan Warga Gayo Lues di Aceh Konvoi Bendera Merah Putih	43
	10	Istana: Qanun Bendera Aceh Bisa Dicabut	15
	11	Aceh Segera Serahkan Hasil Evaluasi Qanun Bendera ke Mendagri	23
	12	Mendagri Harap Gubernur dan DPR Aceh Segera Cabut Qanun Bendera GAM	8
	16	Soal Bendera, Pemerintah Pusat dan Aceh Sepakat <i>Cooling Down</i>	13
	17	Gubernur Aceh Temui Presiden SBY Bahas Bendera dan Lambang GAM	15
	17	Gubernur Mau Revisi Qanun Bendera Aceh	5

		Dilakukan Secepatnya	
	30	Soal Bendera Aceh, Gubernur Zaini Temui Ketua MK	5
	30	Uji Materi Qanun Bendera Aceh ke MA, Bukan ke MK	0
	30	Mendagri: Pembahasan Bendera Aceh Masih Alot	20

Sumber: diolah dari indeks berita www.detik.com

Jumlah berita yang didapatkan dari www.detik.com sejumlah 54 buah berita, dengan jumlah komentar sebanyak 1551 buah. Berita-berita tersebut diambil melalui layanan indeks pencarian topik berita, lalu peneliti memilih judul dan isi berita yang relevan dengan penelitian.

Tabel 4. Populasi data dari www.viva.co.id

Bulan	Tanggal	Judul	Komentar
Maret	26	Bendera GAM Resmi Jadi Bendera Aceh	39
	27	Kemendagri: Mirip Simbol GAM, Bendera Aceh Bisa Dibatalkan	12
	28	Bukan Bendera "GAM" yang Diinginkan Jakarta untuk Lambang Aceh	26
April	1	Mendagri Minta Bendera GAM Dievaluasi	6
	1	Ribuan Pendukung Bendera GAM Berkonvoi di Aceh	11
	1	Bendera GAM Raksasa di DPR Aceh	13
	1	Mendagri: Bendera Aceh Mirip GAM Muat Unsur Separatis	9
	1	Presiden Bisa Batalkan Bendera Aceh	2
	2	Puan: Tidak Boleh Ada Bendera Selain Merah Putih	6
	2	Anggota DPR: Pemerintah Pusat Berhak Evaluasi Perda Aceh	1
	2	Bahas Bendera, Dirjen Otda Kemendagri Sambangi Aceh	7
	2	Seribu Bendera Merah Putih Dikibarkan di Meulaboh	12

	2	Kontroversi di Balik Berkibarnya Bendera Aceh	17
	3	Bahas Soal Bendera GAM, Mendagri Temui Pimpinan Aceh	1
	3	Bendera Kesultanan Aceh Ditolak DPR Aceh	1
	4	Menteri Pertahanan Ultimatum Bendera Aceh	9
	4	Mendagri dan Pemerintah Aceh Mulai Bahas Bendera GAM	7
	4	Bendera Aceh: Lambang Pemberontak atau Kesultanan?	20
	5	Konflik Bendera Meruncing, SBY Panggil Gubernur Aceh	10
	5	SBY: Rakyat Aceh, Mari Lihat ke Depan, Bukan ke Belakang	6
	12	DPR Pantau Pergantian Lambang Bendera Aceh	5
	13	Gubernur Aceh: Bendera Aceh, Sikap Emosional Warga	2
	14	JK Berharap Polemik Bendera Aceh Tak Rusak Perdamaian	1
	15	Polemik Bendera, Gubernur Aceh Sambangi Menko Polhukam	6
	17	Gubernur Aceh-Presiden SBY Bicarakan Bendera "GAM"	7
	30	Gubernur: Punya Bendera Khusus, Aceh Tak Lepas dari NKRI	7
	30	Ketua MK: Bendera Aceh Tak Masalah, Sesuai Prosedur	2
	30	Mendagri Beri Tawaran Agar Aceh Ganti Bendera GAM	2

Sumber: diolah dari indeks berita www.viva.co.id

Jumlah berita yang didapatkan dari www.viva.co.id sejumlah 28 buah berita, dengan jumlah komentar sebanyak 247 buah. Berita-berita tersebut diambil melalui layanan indeks pencarian topik berita, lalu peneliti memilih judul dan isi berita yang relevan dengan penelitian.

Secara keseluruhan, jumlah berita yang berkaitan dengan tema penelitian adalah 123 berita, sedangkan komentar yang dimuat di dalamnya sejumlah 3.763 buah komentar.

Dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan analisis kepada seluruh populasi karena jumlah yang relatif besar. Dari populasi tersebut dipilih sampel komentar-komentar yang memenuhi dua kriteria yang ditentukan peneliti. Dua kriteria yang dimaksud adalah komentar merupakan frasa atau kalimat (bukan kata), isi komentar berkaitan dengan berita atau komentar orang lain.

Martono (2010:67) menuliskan bahwa teknik sampling merupakan metode atau cara menentukan sampel dan besar sampel. Teknik sampling terbagi menjadi dua macam, yaitu probability sampling yang memberikan peluang sama bagi seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel, dan nonprobability sampling yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Peneliti menggunakan salah satu teknik yang termasuk dalam *probability sampling*, yakni *stratified random sampling*. Nazir (2011: 291) menuliskan: “*Stratified random sampling* adalah sampel yang ditarik dengan memisahkan elemen-elemen populasi dalam kelompok-kelompok yang tidak *overlapping* yang disebut *strata*, dan kemudian memilih sebuah sampel secara *random* dari tiap *stratum*.” Mengingat sifat populasi yang homogen dan berjumlah relatif besar, maka teknik *stratified random sampling* merupakan teknik sampling yang paling tepat untuk digunakan.

Sampel penelitian didapatkan dengan cara yang berlapis. Pada awalnya peneliti hendak memilih terlebih dahulu artikel-artikel berita dari masing-masing media. Pemilihan berita ini dilakukan secara acak, dengan ketentuan berita yang mempunyai peluang untuk dipilih adalah berita yang dikomentari oleh pembaca. Dengan cara ini peneliti mendapatkan sampel berita.

Semua komentar yang terdapat di dalam sampel berita dengan demikian merupakan sub populasi. Selanjutnya peneliti hendak menentukan sampel berupa komentar-komentar yang ada di berita. Pemilihan sampel dilakukan dengan kriteria-kriteria yang dibuat oleh peneliti sebelumnya. Penekanan kriteria ini terletak pada isi komentar yang jelas, tulisan yang dapat terbaca, dan berupa kalimat.

Untuk menghitung besaran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin yang dikutip dari Bungin (2005:115) dengan formulasi:

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Keterangan:

n: Jumlah sampel yang dicari

N: Jumlah populasi

d: Nilai presisi (ditentukan dalam penelitian ini sebesar 90% atau $d=0,1$)

Dalam penelitian ini terdapat 3.763 buah komentar yang menjadi populasi. Peneliti menentukan sampel dari masing-masing media online. Cara penentuan sampel ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang proporsional antara ketiga media online yang diteliti. Dengan menggunakan rumus Slovin ini peneliti menentukan jumlah sampel sebanyak 95 komentar untuk Detik.com, 94 komentar

untuk Kompas.com, dan 71 komentar untuk VIVAnews. Dengan demikian total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 260 komentar.

e. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data yang didapatkan, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode yang adalah menginterpretasikan angka yang muncul dalam hasil penelitian. Menurut Narbuko dan Achmadi (2001:44) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian ini bisa bersifat komperatif dan korelatif.

Sedangkan menurut Mardalis (2003:26) penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Selain itu ia juga menekankan bahwa penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

Teknik analisis data bisa dilakukan ketika proses pengumpulan data sudah selesai dilakukan. Data berupa skor angka dari masing-masing unit analisis yang sudah dibuat ini kemudian diolah secara statistika sederhana yaitu distribusi frekuensi. Hasil pengolahan data tersebut masih berupa tabel dan angka, setelah itu baru peneliti menginterpretasikan hasil skor angka tersebut.